**BAB 12**

**ANALISIS EVALUASI KEBIJAKAN, PERUBAHAN DAN KONTINUITAS**

1. **PENDAHULUAN**

# Bab keduabelas akan membahas mengenai analisis evaluasi kebijakan, perubahan dan kontinuitas. Bab ini menjadi dasar untuk bab-bab berikutnya. Uraian bab ini berisi penjelasan tentang mode evaluasi (analisis rasional, evaluasi formatif, evaluasi sumatif), kerangka alternative untuk evaluasi, perubahan dan kontinuitas

**Kompetensi Dasar**

Mampu memahami Analisis Evaluasi kebijakan, Perubahan dan Kontinuitas yang meliputi : mode dan evaluasi kebijakan, perubahan dan kontinuitas pasca evaluasi dan evaluasi dampak/hasil.

**Indikator**

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menyusun evaluasi dengan menggunakan mode dan fase evaluasi yang relevan
2. Merekomendasikan perubahan dan kontinuitas pasca evaluasi
3. Mengevaluasi dampak dan hasil

**Tujuan Pembelajaran**

1. Menguasai analisis evaluasi dengan menggunakan mode dan fase evaluasi yang relevan.
2. Mendapatkan rekomendasi sebagai hasil evaluasi untuk perubahan dan kontinuitas kebijakan pasca evaluasi.
3. Menguasai evaluasi dampak dan hasil
4. **PENYAJIAN MATERI**
5. **Mode dan Konteks Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi mengandung 2 aspek yang saling terkait. Dikemukakan oleh Parson (2006:546) evaluasi terkait dengan : *Pertama*, evaluasi kebijakan dan kandungan programnya dan *kedua,* evaluasi terhadap orang-orang yang bekerja didalam organisasi yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan kebijakan dan program. Selanjutnya membahas dan menyusun evaluasi, maka ada 2 pandangan dalam konteks kerangka dominan, yakni sebagai *pertama*, sebagai bentuk analisis rasional; *kedua,* sebagai alat untuk manajemen sumberdaya manusia.

Evaluasi sebagai analisis rasional, dikemukakan oleh Dye (1987:351) adalah Kegiatan penilaian, pemeriksaan, kontrol dan pemberian imbalanterhadap keluaran-keluaran kebijakan (output kebijakan) dan hasil akhir (outcome) dari kebijakan, karenanya tujuan evaluasi untuk menaksir dan menetapkan apakah kebijakan mencapai tujuan dan hasil akhir yg diharapkan.

Analisis evaluasi membahas dua dimensi : 1) bagaimana sebuah kebijakan bisa diukur berdasarkan tujuan yang ditetapkan, yang berarti membahas evaluasi sebagai aktivitas pengukuran kinerja tujuan; 2) dampak actual dari kebijakan, yang berarti membahas efek dari suatu kebijakan secara keseluruhan atau proses pengimplementasiannya. Sedangkan Analisis evaluasi memiliki sejumlah pendekatan atau tehnik, yakni : 1) tehnik mengukur hubungan antara biaya dan manfaat dengan utilitas, 2) tehnik mengukur kinerja, 3) tehnik menggunakan eksperimen untuk mengevaluasi kebijakan dan program

Palumbo dalam Parson (2006:549-555) mengklasifikasikan analisis evaluasi kebijakan dan kandungan program dapat dilihat dalam 2 macam evaluasi, yaitu :

**Pertama,** *Evaluasi Formatif*. Evaluasi yang dilakukan ketika kebijakan/program sedang diimplementasikan merupakan analisis tentang “seberapa jauh sebuah program diimplementasikan dan apa kondisi yang bisa meningkatkan keberhasilan implementasi. Oleh karena itu, fase implementasi memerlukan evaluasi formatif yang memonitor cara dimana sebuah program dikelola atau diatur untuk menghasilkan umpan balik yang bisa berfungsi meningkatkan proses implementasi. Rossi dan Freeman (1993:163) mendeskripsikan mode evaluasi pada tiga persoalan : Sejauhmana sebuah program mencapai target populasi yang tepat; Apakah penyampaian pelayanannya konsisten dengan spesifikasi desain program atau tidak; Sumberdaya apa yang dikeluarkan dalam melaksanakan program. Monitoring terhadap proses implementasi menjadi alat bagi pembuat kebijakan, stakeholders dan pimpinan untuk mengevaluasi cara program disampaikan/dilaksanakan, sehingga informasi dapat digunakan untuk mengoreksi dan mengontrol proses penyampaian kebijakan secara efektif.

**Kedua**, *Evaluasi Sumatif*. Evaluasi yang berusaha mengukur bagaimana kebijakan/program secara actual berdampak pada problem yang ditanganinya. Mode yang diberlakukannya adalah komparatif : membandingkan (sebelum dan sesudah), membandingkan dampak intervensi terhadap satu kelompok dengan kelompok yang lain, atau antara satu kelompok yang menjadi subyek intervensi dan kelompok lain yang tidak (kelompok control). Salah satu model paling penting dari evaluasi dampak adalah gagasan pengukuran dampak dengan melakukan semacam eksperimen. Pendekatan eksperimental dalam evaluasi melibatkan upaya untuk menerapkan prinsip eksperimentasi untuk problem social dan lainnya.

Mode kedua dalam evaluasi adalam evaluasi sumberdaya manusia. Evaluasi sumberdaya manusia, melibatkan control melalui penilaian/apresiasi/pengukuran kinerja/monitoring terhadap orang-orang yang bekerja di sector public, baik pada tingkat lapangan maupun tingkat manajerial/kebijakan. Thomason sebagaimana dikutip Parson (2006:555) mendifinisikan evaluasi kinerja dalam *Human Resources Management* (HRM) sebagai :

1. Identifikasi tugas yang akan dilakukan, bersama dengan criteria yang akan dipakai untuk mengukur kesuksesan kerja.
2. Evaluasi kinerja, dengan menilai hasil yang dapat diukur atau, jika hasilnya tidak dapat diukur, dengan menilai masukan (input) dari upaya atau tindakan yang relevan.
3. Penentuan jumlah imbalan (reward), renumerasi, atau reinforcement yang akan diberikan untuk meningkatkan dan mempertahankan atau memajukan tingkat kinerja yang ada.

Beberapa tehnik evaluasi manusia, yang diambil dari *Human Resources Management* (HRM) dan *organizational development* (OD) antara lain : 1) skema pembayaran yang dikaitkan dengan kinerja, 2) penilaian dan apresiasi terhadap personil, 3) strategi pengembangan organisasional. Adapun tujuan HRM adalah mengubah orang yang menjalankan kebijakan menjadi lebih: berkomitmen, kompeten, efektif dalam biaya, bersimpati dengan tujuan organisasi. Peningkatan komitmen tentunya bisa dicapai melalui : 1) merekrut orang yang tepat, 2) penekanan pada training di semua level, 3) penilaian staf regular, 4) pmberian penghargaan/imbalan atas kinerja.

Nugroho (2012) menggambarkan lebih lanjut tentang mode evaluasi. Evaluasi kebijakan public berada dalam empat lingkup analisis yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, evaluasi kinerja kebijakan, dan evaluasi linkungan kebijakan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan public berkenaan tidak hanya dengan implementasinya, melainkan berkenaan dengan perumusan, implementasi dan lingkungan kebijakan public.

**Evaluasi Formulasi Kebijakan Publik**

Evaluasi formulasi kebijakan public berkenaan dengan, apakah fomulasi kebijakan public telah di laksanakan dengan : 1). Menggunakan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang hendak diselesaikan, karena setiap masalah public memerlukan model fomulasi kebijakan public yang berlainan; 2). Mengarah pada permasalahan inti, karena setiap pemecahan masalah harus benar-benar mengarah pada inti permasalahannya; 3). Mengikuti prosedur yang di terima secara bersamaan, baik dalam rangka keabsahan maupun dalam rangka kesamaan dan keterpaduan langkah perumusan; 4). Mendayagunakan sumber daya yang ada secara optimal, baik dalam bentuk sumberdaya waktu, dana, manusia, maupun kondisi lingkungan strategis.

Teknik evaluasi formulasi kebijakan public sendiri dapat mengacu pada *isu pertama*, *model formulasi kebijakan public* apa yang di pergunakan. Model fomulasi yang di pilih merupakan ukuran standar yang dapat di pergunakan untuk menilai proses formulasi. Jadi,secara praktis, paling tidak ada 13 model evaluasi formulasi kebijakan public yaitu: Model kelembagaan (*Institutional)*, Model Proses (*Process*), Model Kelompok (*Group*), Model Elite (*Elite*), Model Rasional (*Rational*), Model Inkremental (*Incremental*), Model Teori Permainan (*Game Theory*), Model Pilhan public (*Public Choice*), Model Sitem (*System*), Model Demokrasi, Model Strategis, Model Delebratif. Sederhananya, jika formulasi kebijakan menentukan untuk menggunakan model kelompok, karena masalah yang di hadapi akan dapat di selesaikan dengan model kebijakan yang di rumuskan dalam kelompok, proses formulasinya pun harus secara model kelompok, namun prkatik fomulasinay menggunakan model elite, dapat di katakan bahwa formulasi kebijakan public tidak dapat di pertanggungjawabkan secara proses.

*Isu Kedua* adalah muatan. Apakah kebijakan itu sendiri bermuatan hal-hal yang relevan dengan masalah yang hendak di pecahkan. Sederhananya evaluator beberapa kali dapat melihat apakah memang masalah yang di muat dalam kebijakana tersebut merupakan masalah strategis atau teknis. Kesesuaian berjenjangnya adalah : 1) Kesesuaian muatan dengan masalah,2) Kesesuaian dengan masalah strategis,3) Kesesuaian muatan dengan tujuan yang hendak di capai. Di luar kreteria dasar tersebut, formulasi kebijakan public tidak dapat di pertanggungjawabkan.

*Isu ketiga*, setelah proses dan muatan, adalah bentuk kebijakan, yaitu bentuk secara makro, mikro, dan kataa-per-kata. Bentuk makro menilai apakah benar kebijkan tersebut dapat di wadahi dalam bentuk perda, apakah tidak lebih benar bentuk keputusan Bupati. Bentuk mikro adalah susunan kebijakan, bentuk perda, keputusan bupati, surat edaran, jelas berbeda satu sama lain. Kesemuanya harus sesuai dengan kebutuhan jenis kebijakan. Bentuk kata perkata mempunyai dua ukuran pokok, yaitu 1) apakah penggunaan kata perkata sudah mewakili gagasan yang hendak di kemukakan dan 2) apakah kata-perkata sudah benar secara tata bahasa yang di gunakan dan tata bahasa hukum. Kebijakan public adalah sebuah keputusan yang berlaku untuk semua, karena itu kebijakan public tidak dibenarkan untuk: 1) Mengandung hal-hal yang dapat di presentasikan secara ganda, atau lebih; 2) Tidak boleh ada kontradiksi anatr pasal; 3) Tidak ada pasal yang bersifat saling menjatuhkan; 4) Tidak ada pasal yang menjadi perusak dari keefektifan kinerja kebijakan; 5) Satu pasal atau ayat mengandung lebih dari satu muatan; 6) Penggunaan bahasa tidak benar secara tata bahasa; 7) Penggunaan bahasa tidak benar secara hukum.

**Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik**

Evaluasi implementasi kebijakan public adalah untuk mengetahui variasi dalam indicator-indikator kinerja yang di gunakan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok yaitu: 1) Bagaimana kinerja implementasi kebijakan public?. Jawabannya berkenaan dengan kinerja implementasi public (variasi dari *outcome*) terhadap variable independen tertentu. 2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu?. Jawabannya berkenaan dengan factor kebijakan itu sendiri, organisasi implementasi kebijakan, dan lingkungan implementasi kebijakan yang mempengaruhi variasi *outcome* implementasi kebijakan. 3) Bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan public.

Pertanyaan ini berkenaan dengan “tugas” pengevaluasi untuk memilih variable-variabel yang dapat di ubah, atau *actionable* variabel–variabel yang bersifat natural atau variable lain yang tidak bisa di ubah tidak dapat di masukkan sebagai variable evaluasi. Namun demikian ada beberapa hal yang dapat di gunakan sebagai panduan pokok, yaitu: *Pertama,* terdapat perbedaan tipis antara evaluasi kebijakan analisis kebijakan. Namun demikian, terdapat satu perbedaan pokok, yaitu analisis kebijakan biasanya di peruntungkan bagi lingkungan pengambil kebijakan untuk tujuan formulasi atau penyempurnaan kebijakan, sementara evaluasi dapat di lakukan oleh internal ataupun eksternal pengambil kebijakan. *Kedua,* evaluasi kebijakan yang baik harus mempunyai beberapa syarat pokok, yaitu: (a) Tujuannya menemukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan. (b) Yang bersangkutan harus mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan target kebijakan. (c) Prosedur evaluasi harus dapat di petanggungjawabkan secara metodologi. (d) Evaluator haruslah individu atau lembaga yang mempunyai karakter profesional, dalam arti menguasai kecakapan keilmuan, metodologi dan dalam beretika. (e) Evaluasi di laksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian.

**Evaluasi Kinerja Kebijakan**

Penilaian kinerja menjadi isu penting dalam kebijakan public. Alasan pertama, Karena kebijakan di buat untuk suatu tujuan. Kebijakan di buat tidak untuk kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, kebijakan harus di nilai dari sejauh mana ia mencapai tujuan kebijakan yang di harapkan. Penilaian kinerja merupakan kunci keberhasilan organisasi,karena menentukan apa yang harus di capai oleh organisasi, sejauh mana pencapaian, dan apa yang belum di capai. Pengukuran kinerja bahkan merupakan kegiatan yang mempunyai konstribusi multifungsi, sebagaimana di kemukakan spritzer (dalam Nugroho,2012 ) sebagai berikut: “*Some major function of performance measurement”: 1) Measurement direct behavior,2) Measurement increases the visibility of performance,3) Measurement focuses attention,4) Measurement clarify expectations,5) Measurement enables accountability,6) Measurement increases objectivity,7) Measurement provides the basis for goal-setting,8) Measurement improves execution,9) Measurement promotes consistency,10) Measurement facilitates feedback,11) Measurement increase alignment,12) Measurement improves decision making,13)Measurement improves problem-solving,14) Measurement provides early warnig signals,15) Measurement enhaces understanding,16) Measurement enable prediction,17) Measurement motivates.*

**Evaluasi Lingkungan Kebijakan Publik**

Lingkungan kebijkan pada dasarnya terdiri atas delapan konteks, yaitu: Politik, Budaya dan nilai-nilai, Ekonomi, Teknologi, Social dan demografi, Sejarah, Alam (iklim), Kebijakan lain. Delapan konteks lingkungan tersebut mempengaruhi kebijakan public melalui dua institusi, yaitu kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Kedua jenis kelompok ini dapat merupakan kelompok yang sama, Misalnya, Asosiasi pengusaha merupakan kelompok kepentingan yang dapat berubah menjadi kelompok penekan yang membawa kepentingan kelompok untuk di masukkan dalam agenda kebijakan. Jadi lingkungan sebenarnya selalu bermakna eksternal. Evaluasi kebijakan merunjuk pada segala sesuatu di luar kebijakan, baik rumusan (dan proses perumusannya), implementasi, dan kinerja kebijakan.

Meskipun lingkungan kebijakan menentukan efektivitas kebijakan, pada kenyataanya jenis evaluasi ini mendapat sedikit sekali perhatian, baik dari pratisi maupun akademis evaluasi kebijakan public. Kenyataan ini harus diakui karena kesungguhannya sekuat apapun pengaruh lingkungan, ia merupakan factor yang berada di luar kendali kebijakan public.oleh karena itu lingkungan acap kali “di keluarkan” dari evaluasi kebijakan public.

Evaluasi lingkungan terbagi menjadi dua, 1) evaluasi lingkungan formulasi kebijakan dan 2) evaluasi lingkungan implementasi kebijakan. Evaluasi lingkungan formulasi kebijakan menghasilkan sebuah deskripsi bagaimana lingkungan kebijakan di buat dan kenapa kebijakan seperti itu. Evaluasi lingkungan implementasi kebijakan berkenaan dengan factor-faktor lingungan apa saja yang membuat kebijakan gagal maupun berhasil diimplemetasikan. Jadi, pada prinsipnya evaluasi lingkungan kebijakan public memberikan sebuah deskripsi yang lebih jelas bagaiman konteks kebijakan di rumuskan dan diimplementasikan. Sebagian besar upaya ini memang jatuh kesisi deskriptif dengan tujuan membangun sebuah pemahaman bersama untuk membangun general wisdom agar dapat memahami kinerja kebijakan public.

1. **Perubahan dan Kontinuitas dalam Pembuatan Kebijakan**

Kebijakan akan terus menerus mengalami perubahan sebagai akibat dari evaluasi kebijakan, atau mungkin konsekuensi dari perubahan dalam lingkungan kebijakan, politik dan pembelajaran birokratis, atau perkembangan ide dan struktur. Karena itu kebijakan baru seringkali muncul dari kebijakan yang sudah ada atau tumpang tindih dengan kebijakan yang sudah terbentuk. Perubahan kebijakan juga bisa terjadi dari kebijakan sebelumnya yang telah membuat kondisi menjadi lebih buruk atau kebijakan tidak memadai. Keterbatasan pertumbuhan ekonomi dan keuangan public juga akan menentukan arah perubahan kebijakan.

Hogwood dan Peters (dalam Parson,2006: 574) ada beberapa term tipe perubahan, yakni : ***Pertama***, Inovasi Kebijakan. Terjadi ketika pemerintah menjadi terlibat dalam problem atau area yang baru. Dengan adanya fakta bahwa ruang kebijakan modern sangat padat, kebijakan baru mungkin akan diletakkan dalam kerangka yang ada dalam konteks kebijakan terkait. Inovasi dalam bentuk murni jarang ada, sebuah kebijakan baru adalah contoh dari reinkarnasi dari sebuah kebijakan. Selain itu inovasi adalah dalam rangka kebijakan itu dpata diterima semua pihak. ***Kedua,*** Suksesi Kebijakan. Penggantian kebijakan yang sudah ada dengan kebijakan lain. Perubahan ini tidak menimbulkan perubahan fundamental dalam pendekatannya, tetapi melanjutkan kebijakan yang sudah ada. Ada 4 tipe suksesi, yaitu : 1) Linear, penggantian langsung satu kebijakan/program/organisasi dengan yang lainnya; 2) Konsolidasi, penyusunan ulang (re-packing) sejumlah kebijakan/program/organisasi menjadi satu kesatuan yang utuh; 3) Splitiing (pemisahan), pembongkaran suatu kebijakan/programorganisasi menjadi sejumlah komponen yang terspisah-pisah; 4) Nonlinear, kombinasi kompleks dari tipe-tipe suksesi lainnya. ***Ketiga,*** Pemeliharaan Kebijakan.Adaah adaptasi kebijakan-kebijakan atau penyesuaian untuk menjaga agar kebijakan tetap ditempatnya. ***Keempat***, Terminasi Kebijakan.Merupakan sisi lain dari inovasi, dimana sebuah kebijakan/program akan dihentikan, dikurangi, dan pengeluaran public akan dipotong, sehingga dia menjadi bekas kebijakan.

Tipe-tipe reduksi/terminasi kebijakan adalah : 1) penurunan kebijakan dari luar, 2) pengurangan dan deteriosasi, 3) pencabutan clientele, 4) eliminasi elemen program, 5) eliminasi program. Terminasi dikatakan Hogwood dan Gunn (dalam Parson,2006:577-578) akan melibatkan beberapa aspek kebijakan dan organisasi, yaitu : 1) Fungsional : akhir dari pelayaan/tanggungjawab; 2) Organisasional : memilih untuk membubarkan organisasi; 3) Kebijakan, mengabaikan pendekatan yang sudah ada dan mengadopsi strategi baru atau diifinisi problem; 4) Program, kebijakan menggunakan tindakan/instrument untuk mengimplementasikan tujuan kebijakan.

Ada 9 faktor yang menyulitkan implementasi terminasi, yakni : 1) keengganan intelektual, 2) kurangnya dorongan politik, 3) kepermanenan institusional, 4) konservatisme institusional, 5) konservatisme dinamis, 6) koalisi anti-terminasi, 7) rintangan hukum, 8) biaya yang tinggi, 9) konsekuensi yang merugikan, 10) penolakan dan pertentangan.

1. **Mengevaluasi Dampak dan Hasil**

Rossi dan Freeman (dalam Parson,2006: 604) mengatakan bahwa penilaian atas dampak adalah : memperkirakan apakah intervensi menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. Tujuan dasar dari penilaian dampak adalah untuk memperkirakan efek bersih dari sebuah intervensi, yakni perkiraan dampak intervensi yang tidak dicampuri oleh pengaruh dari proses dan kejadian lain yang mungkin juga mempengaruhi prilaku atau kondisi yang menjadi sasaran program yang sedng dievaluasi itu.

Beberapa metode evaluasi hasil dan dampak adalah : 1) Membandingkan problem/situasi/kondisi dengan apa yang terjadi sebelum intervensi. 2) Melakukan eksperimen untuk menguji dampak suatu program terhadap suatu area/kelompok dengan mmembandingkan apa yang terjadi di area/kelompok lain yang belum menjadi sasaran intervensi. 3) Membandingkan biaya dan manfaat yang dicapai sebagai hasil dari intervensi. 4) Menggunakan model untuk memahami dan menjelaskan apa yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan masa lalu. 5) Pendekatan kualitatif dan judgemental untuk mengevaluasi keberhasilan/kegagalan kebijakan dan program. 6) Membandingkan apa yang sudah terjadi dengan tujuan atau sasaran tertentu dari sebuah program atau kebijakan. 7) Menggunakan pengukuran kinerja untuk menilai apakah tujuan atau targetnya sudah terpenuhi.

Parson (2006:605) berpendapat pada dasarnya evaluasi dampak actual dari kebijakan adalah soal nilai, bukan fakta, sehingga arti dari angka-angka tersebut tergantung dari maksud si pembuat kebijakan. Harrop (dalam Parson,2006:614-615) memperkuat bahwa sifat simbolis tidak boleh diabaikan ketika mengevaluasi hasil dan dampak. Dye (1987:355) dalam Parson (2006:614-615) kebijakan bukan sekedar menghasilkan efek perubahan dalam kondisi masyarakat, kebijakan juga menyatukan orang dan mempertahankan ketertiban negara. Misalnya kebijakan memerangi orang miskin, mungkin tidak akan berdampak signifikan bagi si miskin, tetapi membuat orang bermoral, orang kaya dan miskin berpandangan bahwa pemerintah memperhatikan orang miskin.

1. **RANGKUMAN**

Evaluasi mengandung 2 aspek yang saling terkait, *Pertama*, evaluasi kebijakan dan kandungan programnya dan *kedua,* evaluasi terhadap orang-orang yang bekerja didalam organisasi yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan kebijakan dan program.

Ada 2 macam evaluasi, yaitu : *Evaluasi Formatif* dan *Evaluasi Sumatif*. Kebijakan akan terus menerus mengalami perubahan sebagai akibat dari evaluasi kebijakan, atau mungkin konsekuensi dari perubahan dalam lingkungan kebijakan, politik dan pembelajaran birokratis, atau perkembangan ide dan struktur. Karena itu kebijakan baru seringkali muncul dari kebijakan yang sudah ada atau tumpang tindih dengan kebijakan yang sudah terbentuk. Perubahan kebijakan juga bisa terjadi dari kebijakan sebelumnya yang telah membuat kondisi menjadi lebih buruk atau kebijakan tidak memadai. Keterbatasan pertumbuhan ekonomi dan keuangan public juga akan menentukan arah perubahan kebijakan. Ada beberapa term tipe perubahan, yakni : 1) Inovasi Kebijakan, 2) Terminasi Kebijakan,3) Pemeliharaan Kebijakan, 4) Suksesi kebijakan. Evaluasi dampak actual dari kebijakan adalah soal nilai, bukan fakta, sehingga arti dari angka-angka tersebut tergantung dari maksud si pembuat kebijakan, karenanya sifat simbolis tidak boleh diabaikan ketika mengevaluasi hasil dan dampak.

1. **LATIHAN**
2. Deskripsikan 2 mode evaluasi kebijakan
3. Jika ingin mengevaluasi kinerja pegawai, mode seperti apa yang dipakai untuk mengevaluasi kinerja pegawai tersebut.
4. Bagaiamana cara mengevaluasi kebijakan dari sisi formulasi kebijakan.
5. Mengapa sebuah kebijakan perlu dirubah
6. Apa yang membedakan antara inovasi dan terminasi dalam perubahan kebijakan
7. Apa yang membuat sebuah kebijakan sulit diterminasi.
8. **PUSTAKA RUJUKAN**

Nugroho,Riant.2012. ***Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan,Manajemen Kebijakan*** . Elex Media Komputindo.Jakarta

Parson,Wayne.2006. Public Policy : ***Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan***. Kencana. Jakarta

1. **GLOSSARI**

***Simbolisme*** : Kebijakan yang tidak menyelesaikan persoalan, tidak mendasar hanya menyangkut kulit luar saja

***Efek Bersih Kebijakan*** : Hasil kebijakan yang memang disebabkan oleh intervensi kebijakan yang bersangkutan

***Koalisi Anti Terminasi*** : Kerjasama antara para aktor-aktor kebijakan yang menentang penghentian kebijakan